

Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Apbdesa Desa Tumbang Bunut Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas

The Influence of Accountability And Transparency on The Management of The Apbesa of Tumbang Bunut Village, Rungan District, Gunung Mas Regency

Selviani Ningsih¹, Rahmiati², M.Ichsan Diarsyad^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya
email : echuakuntansi5@gmail.com

ABSTRACT

The porpose of this study is to determine the readiness of village government in realizing accountability and transparency in the management of APBDesa By quantitative method there hypotheses proposed in this study. The subjects of this research are 4 principal areas of village, village government of Tumbang Bunut, The sampling technique in this research is done using the techningque of vorposive sampling the instrument of data collection in this research is questionnaire of questionnaire. The results of this study indclate that accountability is positively releated to the management of APBDesa, Transparency is also positively realited to the management of APBDesa, and accountability, and transparency together have a positive relationship to APBDesa Mangement

Keywords : Management Of APBDesa, Accountability and Transparency, village of tumbang bunut

ABSTRAK

ujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan pemerintah desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDesa Desa Tumbang Bunut Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas. Dengan Metode penelitian Kuantitatif subjek penelitian 4 bidang Pokok Desa, Teknik pengambilan sampel teknik *purvosive Sampling* Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Hasil Penelitian menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi sudah diterapkannya pertanggungjawaban dan akses informasi yang memandai dengan baik dan sesuai dengan peraturan dalam pengelolaan APBDesa. Keterbatasan penelitian terletak pada sulitnya menjangkau para pemerintah desa, terkehususnya pada pagi hingga siang hari. Maka diharuskan peneliti melakukan penelitian pada sore dan malam hari.

Kata Kunci : Pengelolaan APBDesa, Akuntabilitas, dan Transparansi, Desa Tumbang Bunut.

Submitted : September 22nd, 2019
Revised : October 25th, 2019
Accepted : November 31st, 2019

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (APBDesa) menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Adapun permasalahan yang terjadi pada Desa Tumbang Bunut Yang ada Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas yaitu pemerintah desa baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mengelola keuangannya belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Diantaranya yaitu pelaksanaan musyawarah desa belum maksimal, sedangkan musyawarah desa merupakan salah satu akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan APBDesa dan musyawarah desa merupakan kewajiban pemerintah desa dalam mengimplemen tasikan Undang-undang Nomor 6 Desa Tahun 2014, karena dalam pasal 54 menyatakan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian dalam mengelola pengelolaan APBDesa dimana pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum stabil dalam penyusunan Keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan

adanya permasalahan tersebut sehingga banyak hal yang harus dikaji berkaitan dengan pengelolaan APBDesa, sehingga kegiatan penelitian mengenai permasalahan tersebut sangat penting dilaksanakan,

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntabilitas

bdul Halim dan Muhamad Ikkal (2012:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Mardiasmo (2012:46) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggung jawaban yang dikerjakan secara berkala. Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

Transparansi

Hari Sabarno (2014:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemrintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan

memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Pengelolaan APB Desa

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2015:3) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah Pengelolaan keuangan desa (APBDesa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Adapun penelitian sebelumnya oleh Suci Indah Hamifah dan Sugeng Praptoyo (2015) dalam jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Menurut Agus Dwiyanto (2015:80) transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemeritahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.

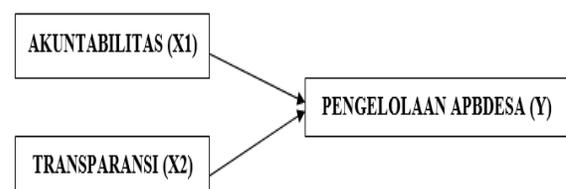
Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. menyatakan bahwa “Pengelolaan APBDesa Tumbang Bunut Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas, Sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari laporan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga pengelolaan keuangan digunakan untuk

meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat.”

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Transparansi Dan Pengelolaan APB Desa

Selanjutnya, berdasarkan data penyebaran pernyataan koesioner penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 dan data desa yang diperoleh pada realisasi Pengelolaan APBDesa tahun 2016, menyajikan bukti bahwa peningkatan Transparansi berhubungan kuat dengan Pengelolaan APBDesa. Hasil penelitian yang dikemukakan juga oleh Sri Ayu Purnama (2013) Dengan sampel 3 kecamatan dan 36 Desa pada tahun anggaran 2013-2015, menyajikan bukti bahwa terdapat hubungan secara persial bernilai positif dan signifikan antara Transparansi dengan Pengelolaan APBDesa. Pernyataan tersebut dapat dinyatakan dengan hipotesis sebagai berikut: H_a : ketika Transparansi mengalami kenaikan per satuan maka pengelolaan APBDesa juga akan meningkat sesuai dengan kenyataan dilapangan.



Gambar 1 : Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Pemilihan Sampel

Kriteria pemilihan sampel adalah *Porvovise Sampling* dengan melakukan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya sampel dianalisis menggunakan analisis *skala likers* (angket penelitian),

dengan menggunakan tingkat bobot pertanyaan 1-5 untuk nilai dari jawaban pernyataan responden (Sugiyono, 2011).

Tabel 1 : Pemilihan Sampel

Karakteristik Sampel	Jumlah Sampel
A. Deskripsi Populasi	
Penduduk Desa Tahun 2016	448
Laporan Realisasi APBDesa tidak lengkap	(10)
Sampel Akhir 2016	210
B. Sampel Akhir	
1. Kepala Desa dan Perangkat Desa (4 Bidang Pokok Desa)	36
2. Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang Memiliki Pengaruh Bagi Desa	10
3. Pegawai Negeri Sipil/Bidan /Dukun Bayi Terlatih dan Petani	80
4. Masyarakat Desa Dari Usia 18-55 Tahun	84
Jumlah Sampel Akhir	210

EFESIENSI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL

Akuntabilitas (*Accountability*)

Pengaruh Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai variabel independen (Bebas) X1. Yaitu kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggung jawaban yang dikerjakan secara berkala. Konsioner dalam penelitian ini dikembangkan oleh (Sri Lestari: 2016) untuk mengukur pengaruh akuntabilitas ini, adalah pemenuhan karakteristik bahwa pengelolaan anggaran selama ini harus dapat dipertanggungjawabkan: 1. Standar operasional dalam pengelolaan APBDesa. 2. Pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan. Pengukuran variabel digambarkan

dalam skala likert (*likert scale*). Skala likert ini menggunakan lima angka penilaian yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Kurang Setuju, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

Transparansi (*Tranparancy*)

Pengaruh transparansi dalam penelitian ini adalah sebagai variabel independen (bebas) yaitu X2 sebagai Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan. Konsioner dalam penelitian ini dikembangkan oleh (Sri Lestari:2016) untuk pengukur bentuk keterbukaan dalam rangka pengelolaan suatu APBDesa sehingga dapat diketahui dan diawasi: 1. Kualitas Informasi Pengelolaan Anggaran 2. Kebebasan atas arus informasi. Pengukuran variabel digambarkan dalam skala likert (*likert scale*). Skala likert ini menggunakan lima angka penilaian yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Kurang Setuju, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

Pengelolaan Apbdesa

Pengelolaan APBDes dalam penelitian ini adalah sebagai variabel dependen (terikat) sebagai variabel Y yaitu adalah (APBDesa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. keuangan sangat terkait dengan pelaporan keuangan. Mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan (Zheyen: 2011). sehingga Konsioner dalam penelitian ini dikembangkan oleh (Sri Lestari:2016) untuk digunakan sebagai pengukuran APBDesa

yang telah dikelola secara efektif ,efesien dan tepat sasaran yaitu : 1. Pengalokasian sumber daya. 2. Oprasional kegiatan mendukung efesiensi dan efektifitas.

METODE ANALISIS DATA

Uji Validitas

Menurut (Mexambiton, 2010) mengatakan bahwa uji Validitas dilakukan untuk memastikan apakah suatu kuesioner yang akan dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan batas minimum sebesar 0,361 (rtabel).

Uji Reliabilitas

Dengan menggunakan uji reliabilitas peneliti melakukan pengujian dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach dengan nilai yang berkisar =0 sampai dengan 1. Jika semakin tinggi nilai koefisien yang diperoleh maka akan menunjukkan bahwa instrument pengukuran yang digunakan semakin baik dan dapat digunakan (Guilford 1979).

Uji Normalitas

Menurut (Duwi Priyatno, 2012:144)Uji normalitas adalah untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dari 210 sampel pada regresi linier dilaporkan pada tabel 2 dengan nilai mean (Rata-rata) variabel Transparansi menunjukkan tanda positif dan signifikan sebesar 12.169 yang menunjukkan indikasi bahwa sebagian besar variabel Transparansi

berada di atas standar signifikasi dengan nilai 0,001 lebih kecil dari 0,05.

Tabel 2. Rekapitulasi Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Pada Desa Tumbang Bunut

<i>Descriptive statistics</i>						
	N	Range	Min	Max	Sum	mean
Akuntabilitas	9	3.39	1.59	2.10	597.744	68.821
Transparansi	9	4.79	1.39	4.84	450.268	12.169
Pengelolaan APB Desa	9	2.64	1.51	4.32	439.746	12.215
Valid N (listwise)	9					

Pengujian Hipotesis

Tabel 3 menyajikan hasil analisis regresi linier berganda pengujian hipotesis variabel 1 dan 2 menggunakan uji t secara persial dan hipotesis 3 dengan uji F secara simultan. Untuk melihat bagaimana pengaruh dari variabel Akuntabilitas dan Transparansi terhadap pengelolaan APBDesa.

Tabel 3. Regresi Linier Berganda

Model	Ustandarnized coeffecients		Standarnized Coeffecients	T	Sig.
	B	Std.Error	Beta		
1. (Constant)	16.075	4.032		2.594	155
Akuntabilitas	346	162	151	924	011
Transparansi	484	155	420	2.702	035

PEMBAHASAN

Semua mekanisme penciptaan suatu nilai data diwujudkan melalui variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan APBDesa. Dan hasil penelitian membuktikan bahwa kedua variabel akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh signifikan sebesar 0,010 dan 0,001 dianggap lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi lebih memiliki peran signifikan dan bernilai positif dalam pengelolaan APBDesa.

Analisis Tambahan

Menurut Ghazali (2014) mengasumsikan tiga pengujian tambahan untuk mengabsahkan pengujian layak atau tidaknya suatu alat koesioner (Angket) penelitian menunjukkan layak atau tidaknya alat ukur dalam penelitian kuantitatif tentang keuangan desa (APBDesa). Dengan melakukan uji validitas, reliabilitas dan uji normalitas.

Tabel 4. Hasil Uji Validasi Variabel X1 (Akuntabilitas)

Item	Corrected-Total Correlation r-Hitung	r-Tabel	Conclusion	Cronbach's Alpha
1	0.771	0,361	Valid	0.893
2	0.768	0,361	Valid	
3	0.754	0,361	Valid	
4	0.566	0,361	Valid	
5	0.675	0,361	Valid	
6	0.697	0,361	Valid	
7	0.749	0,361	Valid	
8	0.384	0,361	Valid	
9	0,369	0,361	valid	

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS 24.0 2018

Tabel 5. Hasil Uji Validasi Variabel X2 (Transparansi)

Item	Corrected Item-Total Correlation r-Hitung	r-Tabel	Conclusion	Cronbach's Alpha
1	0.717	0,361	Valid	0.999
2	0.685	0,361	Valid	
3	0.670	0,361	Valid	
4	0.680	0,361	Valid	
5	0.556	0,361	Valid	
6	0.792	0,361	Valid	
7	0.650	0,361	Valid	
8	0.698	0,361	Valid	
9	0.580	0,361	Valid	

Sumber; hasil perhitungan SPSS 24.0 2018

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Y (Pengelolaan APBDesa)

Item	Corrected Item-Total Correlation r-Hitung	r-Tabel	Conclusion	Cronbach's Alpha
1	0.531	0,361	Valid	
2	0.706	0,361	Valid	

3	0.456	0,361	Valid	0.860
4	0.783	0,361	Valid	
5	0.631	0,361	Valid	
6	0.733	0,361	Valid	
7	0.601	0,361	Valid	
8	0.755	0,361	Valid	
9	0.623	0,361	Valid	

Sumber; hasil pengolahan SPSS 24.0 2018

Uji realibilitas dinyatakan signifikan jika nilai *Alpha* lebih besar dari nilai r-tabel dengan teknik pengujian menggunakan *product moment* (0,361).di bagi 2, dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1 (Akuntabilitas)

Variable	Cronbach's Alpha	N.Of Item	Conclusion
Akuntabilitas	0,893	9	Reliable
Transparansi	0,999	9	Reliable
Pengelolaan APBDesa	0,860	9	Reliable

Sumber: Spss Versi 24.0 Of Windows 2018

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

No	Nama Variabel	Asym (P-Value)	Kondisi	Keterangan Distribusi Data
1	Akuntabilitas	0.430	P > 0.05	Normal
2	Transparansi	0.447	P > 0.05	Normal
3	Pengelolaan APBDesa	0.499	P > 0.05	Normal

Sumber; hasil pengolahan SPSS 24.0 2018

KESIMPULAN DAN SARAN

PENELITIAN

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan APBDesa . Penelitian ini dilakukan di Desa Tumbang Bunut Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas. dengan responden perangkat desa pada 4 bidang pokok desa, tokoh masyarakat dan masyarakat yang memiliki pengaruh yang cukup besar bagi desa dan juga seluruh masyarakat desa dari usia 18-55 tahun.

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X_1 sebesar 0,346 yang berarti apabila Akuntabilitas (X_1) meningkat 1 poin maka Pengelolaan APBDesa (Y) akan meningkat 0,346 poin. Simpulannya variabel akuntabilitas berhubungan negative dan signifikan terhadap pengelolaan APBDesa. Persamaan garis regresi pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan APBDesa dapat dinyatakan dengan $13,150 + 0,484X_2$. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X_2 sebesar 0,484 yang berarti apabila Transparansi (X_2) meningkat 1 poin maka Pengelolaan APBDesa (Y) akan meningkat 0,484 poin. Simpulannya variabel transparansi berhubungan positif dengan pengelolaan APBDesa. Persamaan garis regresi pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan APBDesa dapat dinyatakan dengan $Y = 10,878 + 0,151X_1 + 0,420X_2 + 115$. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X_1 sebesar 0,151 yang berarti apabila Akuntabilitas (X_1) bertambah 1 poin maka Pengelolaan APBDesa (Y) akan meningkat 0,151 poin dengan asumsi X_2 tetap. Koefisien X_2 sebesar 0,420 yang berarti apabila Transparansi (X_2) meningkat 1 poin maka Pengelolaan APBDesa (Y) akan meningkat 0,420 poin dengan asumsi X_1 tetap.

Keterbatasan

Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini hanya memfokuskan proses penelitian pada objek dan subjek penelitian yang berkaitan dengan Pengelolaan APBDesa pada Desa Tumbang Bunut Saja. Dan Penelitian ini Masih dalam keadaan jauh dari kata sempurna dikarenakan hanya menggunakan pengujian memang sudah pasaran digunakan dalam proses

penelitian namun tidak sepenuhnya mampu memberikan hasil yang sempurna

Saran

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang berkualitas dalam pengelolaan APBDesa sesuai dengan ketentuan yang berlaku diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan APBDesa yang transparan dan akuntabel, maka peneliti memberikan beberapa saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dilakukan di desa Tumbang Bunut Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut

1. Bagi Pemerintah Desa

- a. Koordinasi dan komunikasi antara kepala desa dan BPD lalu dilanjutkan kepada masyarakat harus diperbaiki agar terhindar dari konflik antar masyarakat perangkat desa dan perangkat desa yang akan berpengaruh terhadap berjalannya pemerintahan desa.
- b. Memaksimalkan pelaksanaan musyawarah desa, karena musyawarah desa merupakan kewajiban desa sebagai sarana untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi atas pengelolaan APBDesa agar dana yang diprogramkan disesuaikan dengan harapan bersama.
- c. Perlunya mengevaluasi penggunaan ADD, agar efektif dan efisien serta tepat sasaran. Sehingga pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana.

2. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Meningkatkan peran dan independensi BPD sebagai pengawas kinerja kepala desa,
- b. Dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, BPD harus

- mempertimbangkan kepentingan yang dapat mensejahterakan masyarakat desa.
- c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat desa. Apakah al tersebut diharapkan dapat menampung aspirasi dari masyarakat, karena salah satu fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Bagi masyarakat.
 - a. Masyarakat harus berpartisipasi dalam musyawarah desa.
 - b. Perlunya membangun kesadaran masyarakat dalam mengawasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desanya.
 - c. Menyampaikan aspirasi atau masukan sesuai dengan mekanisme seharusnya, yaitu melalui BPD.
 4. Bagi peneliti selanjutnya.
 - a. Menambahkan variabel-variabel lain yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan APBDesa.
 - b. Menetapkan indikator-indikator yang relevan untuk mengukur akuntabilitas pada pemerintahan desa.
 - c. Menetapkan indikator-indikator yang relevan untuk mengukur pengelolaan APBDesa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita .(2013:28) . *Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta.
- Arifiyanto, D.F dan Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2*, Januari 2013: 94-103
- Arikunto, S. (2012). *Manajemen penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Dwiyanto, Agus. 2015. Reformasi Birokasi Publik di Indonesia. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Fanida, Eva Hany dan Elgia Astuti, 2012. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Study pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*.
- Ghozali, I. dan Arifin. S. (2016). *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta.
- Bambang, (2011;22) “Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten”, Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.
- Hari Sabarno, (2011;10). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi, Akuntabilitas Pemerintah Daerah)*. Jakarta: LIPI Press.
- Halim, Abdul dan Muhamad, Ikbal. (2012:83) *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Hartono, “Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”, eJurnal Ilmu Pemerintahan, 2016
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo.(2013). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.

- Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. www.kajianpustaka.com (04 Maret 2017).
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Kader Pemberdayaan Desa.
- Priyatno Dwi. (2012). *Metode Uji Penelitian*. LP3ES. Jakarta. 2012:137-139
- Peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2014 tentang pngelolaan keuangan desa
- Permendagri No.113 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Nomor 5 Tahun 2015.
- Rasul, Syahrudin. (2014;11). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Sugiyono. (2017;8). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Solekhan, (2012;15). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sumpeno, (2011;222). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Sugeng Praptoyo. (2015). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Swith, Max George.(2010). *Principals and Agents : An explanatory model of public budgeting*. Journal of Public Budgeting and Financial Management (Fall): 325-353.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. (2012;116). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Thomas.(2013;12). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Dipublikasikan. Skripsi. Program S1 Pemerintah Integratif. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Wahyudin, (2015:130). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Pendidikan*. Semarang: Unnes Press. Edisi 1 2015.
- Zyen, Elvira. 2011. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Trikonomika*, 10(1): 52-62